

**BAB I**  
**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI**  
**PEMBERONTAKAN *ISLAMIC STATE OF THE IRAQ AND SYRIA***  
**DI IRAK TAHUN 2014**

**A. Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat adalah negara adi daya yang memainkan peran penting dalam tatanan dunia sejak sebelum PD I, PD II hingga dasa warsa terakhir. Amerika serikat tidak saja menjadi super power dalam bidang militer dan politik namun juga di bidang ekonomi dan teknologi. Negara ini terletak di Benua Amerika dan di kawasan Amerika Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kanada, Sebelah timur berbatasan dengan Samudera Atlantik, di bagian barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan di bagian selatan berbatasan dengan Mexico dan Laut Karibia.<sup>1</sup>

Amerika Serikat atau sering di singkat *United States* adalah sebuah negara berbentuk federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Sebanyak 48 negara terletak di Amerika Utasa, sementara Alaska terletak di sebelah barat Kanada dan Hawaii terletak di Samudera Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki negara koloni seperti Peurto Rico dan Guam yang tergabung dalam persemakmuran. Amerika Serikat adalah negara terbesar ke empat di dunia setelah Rusia, RRC, dan Kanada. Jumlah penduduknya terbesar ketiga setelah Cina dan India. Di bidang ekonomi, Amerika merupakan negara industri maju dalam bidang otomotif, senjata, kimia, elektronik, pertanian, peternakan, penerbangan, dan jasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “United States : Country Profile”, dalam [http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country\\_profiles/1217752.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm), diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990/1991 dengan peristiwa runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat memegang kekuasaan tunggal dunia (monopolar). Dominasi Amerika Serikat terjadi di berbagai bidang, antara lain ekonomi, politik internasional dan pertahanan-keamanan dunia, sebagai bukti adalah dominasinya dalam organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan menanggung lebih dari 25 anggaran operasional PBB, dominasinya dalam keanggotaan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) kepemilikan hak veto dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu, politik luar negeri Amerika Serikat dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain konflik yang masih terjadi di berbagai negara dunia. Pada prinsipnya konflik terjadi karena benturan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersengkata, namun dapat juga dilatarbelakangi oleh benturan kepercayaan dan motivasi sosial-ekonomi yang gagal mencapai kesepakatan jalan tengah (*win-win solution*).

Bagi Amerika Serikat, konflik yang terjadi di berbagai negara dunia menjadi bagian penting bagi implementasi politik luar negeri negara ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush pada tahun 2008 di gedung putih (*white house*) yang menyatakan bahwa :

*“...Amerika Serikat (AS) bukan ingin mengintervensi politik dalam negeri suatu negara dan kami berupaya untuk terlibat lebih lanjut, namun untuk persoalan-persoalan tertentu pemerintah masih terus berupaya demi memperjuangkan perdamaian internasional. Ini salah satunya adalah terorisme dan sampai saat ini (tahun 2008) kami terus konsisten atas hal ini.”*<sup>4</sup>

Pernyataan Presiden George W Bush tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam program perang terhadap terorisme yang kemudian dilanjutkan

---

<sup>3</sup> Barry Buzan and Christopher Albert, *The United States Foreign Policy : The History and Contemporary*, Palgrave Publishing, London-New York, 2008, hal.27-28.

<sup>4</sup> “President Declare Freedom at War With Fear”, dalam <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>, diakses pada tanggal 29 September 2014.

oleh rezim selanjutnya, yaitu kepemimpinan Barack Hussein Obama. Di masa kepemimpinannya, Amerika Serikat menjalankan berbagai intervensi dan kebijakan luar negeri di wilayah Asia, Afrika dan beberapa wilayah lainnya.<sup>5</sup>

Setelah perang dingin berakhir, masalah keamanan tidak hanya menjadi permasalahan domestic dalam negeri saja, tetapi meluas menjadi sebuah masalah yang melintasi batas Negara dalam dunia internasional. Isu keamanan yang terjadi di beberapa negara tentu saja memberikan dampak yang negatif dikawasan tersebut, aksi-aksi itu dapat diartikan sebagai Teroris pada kelompok tertentu. Terrorisme menjadi sebuah isu yang diperdebatkan dan mengemuka setelah terjadinya peristiwa menara kembar WTC (*World trade center*) milik Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak peristiwa itulah perang melawan terorisme resmi di serukan oleh Negara-negara barat, dalam hal ini khususnya Negara Amerika Serikat mulai memberikan kebijakan luar negri nya terhadap Negara-negara yang diduga terkait dengan terorisme, dimulai dengan Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001 hingga diturunkannya presden Irak Saddam Husain pada tanggal 19-20 maret 2003.<sup>6</sup>

Perang melawan aksi-aksi terorisme sebenarnya justru semakin menambah terjadinya serangan-serangan lanjutan terror. Demi memburu para pelaku pemboman gedung *World Trade Centre* (WTC) 11 September 2001, menghabisi orang-orang yang dituduh sebagai teroris juga jaringannya, memusnahkan senjata pemusnah massal, itu dibalik semua itu sebenarnya hanyalah menumbuhkan nilai-nilai Amerika di negara-negara tersebut, dan hanya untuk kepentingan Amerika semata.

Kebijakan intervensi luar negeri sebagai bagian dari perang terhadap terorisme (*war of terrorism*) oleh Amerika Serikat sejak tragedi WTC hingga kepemimpinan Barack Obama tahun 2014, dijalankan antara lain terhadap organisasi Al-Qaeda, Boko Haram di Afrika,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> John Baylis and Steve Smith, *Globalization and World Politic : Third Edition*, Oxford Publishing, Oxford, 2006, hal.411.

Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Asia Tenggara dan lain-lainnya. Pada tahun 2014 muncul organisasi terorisme baru, yaitu *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS).

Salah satu konflik terkini yang terjadi di tahun 2014 adalah pemberontakan ISIS yang merupakan organisasi fundamental Islam yang didirikan pada 3 Januari 2014. Organisasi ini memiliki empat faham ideologi sekaligus, masing-masing yaitu Islamism Sunni (Sunni Islam), Salafist Jihadism (Jihad Salafiah), Worldwide Caliphate (Kekalifahan Islam Internasional) dan Anti Shiaism (Anti Mazab Syiah). Dari sisi kepemimpinannya, ISIS tidak lepas dari peranan tiga tokoh pemimpin, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Oemar al-Shisani dan Abu Mohammad al-Adnani.<sup>7</sup>

Perjuangan ISIS diwujudkan melalui jalur diplomasi dan gerakan bersenjata. Organisasi ini memiliki kekuatan personal yang berjumlah 80.000 hingga 100.000 orang, yang terbagi 50.000 di Suriah dan sekitar 30.000 di Irak. Dalam konteks regional ISIS memiliki posisi yang kuat karena memperoleh akses persenjataan otomatis hingga kendaraan artileri dari afiliasinya antara lain Al-Qaeda, Boko Haram dan Jamaah Islamiyah (JI).<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, upaya ISIS untuk mewujudkan negara Islam ternyata dijalankan dengan tindakan-tindakan represif, termasuk intimidasi, penyerangan, pembakaran pemukiman, peledakan bom dan lain-lainnya. Organisasi ini secara brutal berupaya menyingkirkan kelompok masyarakat dan elit yang non-Sunni, termasuk agama lain. Hingga pada pertengahan Agustus 2014, dilaporkan 3000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korban tindakan kelompok ISIS tersebut.<sup>9</sup>

Tindakan genocida yang dijalankan oleh ISIS kemudian memicu kecaman keras dari masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat. Dalam menangani pemberontakan ini,

---

<sup>7</sup> “Syria-Iraq : The Islamic State Militant Group” dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24179084>., diakses pada tanggal 29 September 2014.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> “Korban Kebrutalan ISIS Capai Tiga Ribu Orang”, *Kompas*, 28 Agustus 2014.

Amerika Serikat mengirimkan misi penyelamatan pada jalur darat hingga serangan melalui jalur udara dengan mengerahkan armada pesawat tempurnya ke Irak. Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS pada tahun 2014 menghabiskan total anggaran sekitar 7,5 juta US Dollar perhari dan secara kumulatif menghabiskan sekitar 1,2 milyar US Dollar. Sebagian besar dari anggaran ini dijalankan sebagai operasional tempur karena Amerika Serikat secara khusus, mengeluarkan pesawat tempur generasi terbaru F-22 Raptor, termasuk peluru kendali jenis Tomhawk.<sup>10</sup>

Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS ternyata menjadi fenomena politik internasional yang menarik. Hal ini disebabkan negara adikuasa ini telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar, meliputi dukungan program/teknis, antara lain pelatihan terhadap personel Irak dan kelompok Kurdi, serta pengiriman personel dan armada tempur ke wilayah Irak untuk memerangi kelompok ISIS. Kasus ini tentunya menunjukkan adanya kepentingan yang begitu besar dari Amerika Serikat sehingga negara ini berupaya menerapkan bentuk-bentuk intervensinya secara sistematis dan terencana.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

**“Apa kepentingan Amerika Serikat di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria (ISIS)* pada tahun 2014 ?”**

## **C. Kerangka Dasar Teori**

---

<sup>10</sup> “Ini Besarnya Anggaran AS Dalam Perangi ISIS” dalam <http://www.antaraneews.com/berita/455572/ini-besarnya-ongkos-as-perangi-isis>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

Untuk menjelaskan untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas penulis menggunakan kerangka teori, yaitu konsep politik luar negeri dan teori kepentingan nasional. Kedua teori ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan secara terperinci tentang kepentingan Amerika Serikat di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2014.

## **1. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Pada definisi lainnya juga disebutkan bahwa, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu berhadapan dengan negara lain atau sekelompok negara lain. Kebijakan politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas (kemampuan). Dalam arti sempit, pengertian kebijakan politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan dalam arti luas, pengertian politik

---

<sup>11</sup> Yanyan Mohammad Yani, *Politik Luar Negeri*, Universitas Padjajaran Publishing, Bandung, 2009, hal.12.

luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>12</sup>

Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Kebijakan politik luar negeri diartikan sebagai "suatu kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional". Melalui politik luar negeri, pemerintah suatu negara memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.

Dengan demikian maka dapat difahami bahwa tujuan kebijakan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor internasional sebagai faktor eksternal.<sup>13</sup>

Menurut James N Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan. Sumber –sumber dalam kebijakan luar negeri pada dasarnya terbagi atas lima hal, masing-masing yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 14.

<sup>13</sup> *Ibid*, 21-22.

<sup>14</sup> Theodore A Coulombis dan JH. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, Penerbit Ptara A Bardin, Bandung, 1990, hal.91.

- a. *External Source*, Sumber-sumber eksternal merupakan perangkat dari sistem internasional untuk mempengaruhi karakteristik dan tingkah laku negara dan non negara. Ini termasuk semua aspek bentuk eksternal Amerika atau suatu tindakan ke luar negara. Kebijakan luar negeri Amerika dipengaruhi oleh kondisi dari lingkungan internasional
- b. *Societal Sources*, Sumber-sumber kemasyarakatan merupakan aspek dari non pemerintah dari suatu system politik yang mempengaruhi tingkah laku eksternal negaranya.
- c. *Governmental Sources*, Sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang membatasi atau menambah suara-suara dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika.
- d. *Role Sources*, Sumber-sumber peran merupakan hal yang penting karena pembuat keputusan dipengaruhi oleh tingkah laku social dan norma-norma yang legal dalam peran yang dipegang oleh seseorang. Posisi pembuat keputusan memegang tingkah laku mereka dan masukan bagi kebijakan luar negeri.
- e. *Individual Sources*, Sumber-sumber individu merupakan karakteristik seseorang yang mempengaruhi tingkah laku dan pembuatan kebijakan luar negeri. Seperti karakteristik seorang presiden yang berpengaruh terhadap tingkah laku politik luar negerinya.

Kemudian kebijakan luar negeri diimplementasikan dalam berbagai tindakan, antara lain melalui kerjasama luar negeri, pembangunan konsorsium, mediasi dan forum multilateral hingga intervensi. Kesemuanya ditujukan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Intervensi luar negeri dianggap menjadi solusi yang ideal karena tingkat

keberhasilan yang lebih efektif karena langsung menargetkan pada titik persoalan yang terjadi, meskipun hal ini cenderung bertentangan dengan konsep *non-intervence*.<sup>15</sup>

Secara etimologi (harfiah) intervensi merupakan istilah dalam politik internasional yang berarti “ ikut campur tangannya suatu negara dalam soal-soal negara lain”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diuraikan bahwa intervensi berarti ikut campur tangan ke dalam urusan dalam negeri oleh negara lain.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Encyclopedia Americana diuraikan bahwa:

*“Intervention, in international law means the dictatorial interference by a state in the internal affairs of another state or in the relations between two other states”*. (Intervensi dalam hukum internasional mempunyai pengertian campur tangannya negara-negara diktator ke dalam urusan dalam negeri negara lain).<sup>17</sup>

Intervensi yang dilakukan oleh negara asing (khususnya negara besar) biasanya merupakan tindakan yang sangat dramatik, karena diorganisasikan dengan amat baik. Intervensi merupakan semua tindakan yang mempunyai dampak tertentu secara langsung atau lambat laun pada politik dalam negeri suatu negara lain, termasuk di dalamnya semua bentuk bujukan dan program diplomatik, ekonomi serta militer.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional ini sering disebut sebagai konsepsi umum yang merupakan unsur vital bagi negara karena tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan dalam politik luar negeri adalah inti dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai kepentingan negara untuk melindungi territorial dan kedaulatan Negaranya. Jika menggunakan pendekatan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.78.

<sup>17</sup> “The Definition of Politic Intervence” Microsoft Eencarta Dictionary, Free Ensiklopedia CD Room, 2010, chapter ix.

realisme akan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan negara sebagai unitary aktor yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut. Menurut

Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional, adalah sebagai berikut :

*“Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (decision maker) suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan yang paling vital dari suatu negara berdaulat, yaitu kemerdekaan, integritas wilayah, ekonomi, militer dan keamanan.”*<sup>18</sup>

Konsep kepentingan nasional disini diartikan dalam istilah kekuasaan. Konsep ini merupakan penghubung antara pemikiran yang berusaha memahami politik internasional dan realita yang harus dipahami. Konsep ini menentukan politik sebagai lingkungan tindakan dan pengertian yang berdiri sendiri (otonom) terpisah dari lingkungan lainnya, seperti ilmu ekonomi, etika, estetika atau agama. Konsep kepentingan yang didefenisikan sebagai kekuasaan, memaksakan disiplin intelektual kepada pengamat, memasukkan keteraturan rasional kedalam pokok masalah politik, sehingga memungkinkan pemahaman politik secara teoritis.<sup>19</sup>

Kepentingan sendiri merupakan politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara.

---

<sup>18</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, third edition, ABC Clio Publisher, Western Michigan University-California, 1982, hal.128.

<sup>19</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *Ibid*, hal.117.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional yang dimaksud diartikan sebagai tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan yang paling vital dari suatu negara berdaulat, yaitu kemerdekaan, integritas wilayah, ekonomi, militer dan keamanan.”

Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*.<sup>20</sup> Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri menekankan hubungan dan kepentingan antara pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain atau organisasi internasional.

Berdasar pada konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton di atas maka dapat diketahui bahwa esensi dari kepentingan nasional suatu negara adalah menyangkut lima hal, yaitu :

- a. Kemerdekaan. Hal ini merupakan sebuah wujud masa depan dari suatu negara yang bebas dari dominasi atau intervensi asing sehingga dapat menentukan masa depannya serta menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.
- b. Integritas wilayah. Hal ini merupakan kepentingan yang sangat penting karena integritas dapat menjamin sebuah kesinambungan bernegara dengan sebuah wujud kesatuan yang saling mendukung antara wilayah satu dengan yang lainnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- c. Ekonomi. Hal ini merupakan faktor penting karena ekonomi merupakan variabel penting yang turut menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam menentukan citra suatu negara di mata internasional.
- d. Militer. Hal ini merupakan faktor penting sebagai alat utama pertahanan suatu negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Keberadaan fungsi militer juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas dalam negeri.
- e. Keamanan. Hal ini merupakan faktor penting untuk mewujudkan sebuah eksistensi negara dalam mensejahterakan masyarakat, serta mengimplementasi pembangunan dan berkelanjutan. Selain itu, keamanan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya yang melibatkan aktor-aktor luar negeri.

Kelima konsep di atas memiliki keterkaitan antara variabel satu dengan yang lainnya, misalnya keamanan tidak akan terwujud apabila tidak didukung dengan bidang militer yang memadai. Demikian juga halnya dengan keberadaan militer yang memadai tentunya tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan perekonomian yang maju, demikian pula dengan variabel-variabel lainnya.

Berdasar pada tiga konsep di atas maka dapat difahami/dielaborasi bahwa kepentingan Amerika Serikat di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2014 ternyata tidak lepas dari kepentingan nasional negara ini. Intervensi yang dijalankan pada prinsipnya menjadi bagian dari implementasi politik luar negeri yang telah tertata/terussun secara sistematis, terkait dengan keberadaan Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem politik-pemerintahan yang moderen.

Politik luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat merupakan bagian dari keputusan formal yang legitimasinya telah memunhi serangkaian pembahasan dan pertimbangan, baik pada level pemerintah, yang dalam hal ini kepemimpinan Barack Obama hingga Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta persetujuan dari parlemen (kongres) negara ini. Semua dari implementasi politik luar negeri dijalankan untuk mendukung kepentingan nasional.

Keberadaan ISIS sebagai kelompok fundamental (teroris) yang beroperasi di Suriah dan Irak akan sangat memungkinkan untuk memperlas wilayah aneksasinya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dari Amerika Serikat, yang kemudian menjalankan intervensinya karena ISIS dianggap mengganggu kepentingan nasional di Irak secara politik, yaitu berkaitan dengan upaya Amerika Serikat dalam membangun supremasi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ini disebabkan karena ISIS menjadi organisasi yang menggunakan masyarakat sipil sebagai target, selain pemerintah Irak dan Suriah.

Kemudian kepentingan Amerika Serikat selanjutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan, yaitu upaya mengamankan ekspor dari Irak ke Amerika Serikat.

Jika dilihat dari faktor ekonomi Irak pasca invasi tahun 2003 merupakan negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang menarik. Pada tahun 2012/2013 tingkat perkembangan *gross domestik product* (GDP) mencapai angka 242,5 milyar US Dollar. Perkembangan perekonomian Irak ini di dukung sektor manufaktur, jasa, perbankan hingga pertanian.<sup>21</sup> Pencapaian ekonomi ini akan terganggu jika keamanan dalam negeri Irak dan regional Timur-Tengah tidak berjalan secara kondusif. Inilah yang menjadi titik temu atas intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak tahun 2014.

#### **D. Hipotesa**

---

<sup>21</sup> "Doing Bussiness in Iraq", dalam <http://www.doingbusiness.org/data/exploreconomies/iraq/>, diakses pada tanggal 1 November 2014.

Melalui uraian kerangka dasar teori maka dapat ditarik hipotesa bahwa kepentingan Amerika Serikat di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS) di Irak dan Suriah pada tahun 2014 yaitu :

Pertama, Kepentingan pada bidang politik (keamanan) yaitu sebagai agenda membangun demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Irak.

Kedua, Kepentingan pada bidang ekonomi yaitu sebagai upaya dalam mengamankan kerjasama ekspor Irak ke Amerika Serikat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.<sup>22</sup>

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1989, hal.140-141.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet.

### **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dan membuktikan hipotesa tentang kepentingan Amerika Serikat di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2014.
2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan tentang berbagai dinamika politik luar negeri Amerika Serikat dan isu keamanan internasional di wilayah Timur-Tengah, khususnya terkait dengan pemberontakan ISIS.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2014. Dipilih tahun 2014 karena menunjukkan periode yang menunjukkan bentuk-bentuk intervensi dan kepentingan Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS). Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansi dengan tema yang sedang dibahas.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum politik luar negeri Amerika Serikat di wilayah Timur-Tengah, khususnya Irak. Selain itu, pada bab ini juga akan diuraikan tentang bentuk-bentuk kebijakan intervensionalisme Amerika Serikat.

BAB III membahas tentang deskripsi *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS), meliputi sejarah, perkembangan, kronologi kasus kekerasan dan berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai bukti nyata terhadap ancaman keamanan nasional Irak dan regional Timur-Tengah, serta bentuk-bentuk intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di negara ini.

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yang menjelaskan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat pada bidang politik/keamanan dan ekonomi di balik intervensinya dalam menangani pemberontakan *Islamic State of the Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2014.

BAB V merupakan bab berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.